

**PERSEPSI PUBLIK MENGENAI
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KOTA SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

INDAH FITRI PURWANTI
NIM. C2B 008 038

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Indah Fitri Purwanti
Nomor Induk Mahasiswa : C2B 008 038
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP
Judul Skripsi : **PERSEPSI PUBLIK MENGENAI
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KOTA SEMARANG**
Dosen Pembimbing : Prof. Dra. Hj. Indah Susilowati, M.Sc, Ph.D

Semarang, 21 Juni 2012

Dosen Pembimbing,

(Prof. Dra. Hj. Indah Susilowati, M.Sc, Ph.D)
NIP. 19630323 198803 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Indah Fitri Purwanti
Nomor Induk Mahasiswa : C2B 008 038
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP
Judul Skripsi : **PERSEPSI PUBLIK MENGENAI
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KOTA SEMARANG**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal2012

Tim Penguji :

1. Prof. Dra. Hj. Indah Susilowati, M.Sc, Ph.D (.....)
2. Prof. Drs. Waridin, MS. Ph.D (.....)
3. Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP (.....)

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Indah Fitri Purwanti

NIM : C2B008038

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

PERSEPSI PUBLIK MENGENAI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SEMARANG

adalah hasil karya saya dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di daftar pustaka.

Semarang, 21 Juni 2012
Yang membuat pernyataan

Indah Fitri Purwanti
NIM. C2B 008 038

ABSTRACT

The purpose of the study was to identify whether the level of public perception in assessing environmental management in Semarang city seen from the Pressure, that was the pressure on the environment as a result of human activity. State, that was the state management of the environment as the result of the activities carried out in the environment. Response, the effort to overcome the effects of pressure and environmental state (Kenneth, et al, 2008 and OECD, 2001,2003,2008). Indicator or object in the research of green open space (RTH), urban forests, surface water, ground water, air, and coastal (BLH, 2010). Also provide recommendations efforts to implement environmentally sustainable.

It used primary and secondary data with Quoted purposive sampling. Respondent sample was taken as the city of Semarang about 110 people respondents, and 8 respondents key persons. Analytical methods used were descriptive statistics. The method of analysis used is the mixed method with a quantitative approach used is descriptive statistics and qualitative approach is done by direct observation in the field and in-depth interviews with key persons respondents.

The results of the identification of pressures, that are most to be pressure for environmental management is the activity of the growth of settlements in the management of green open spaces (RTH) and the urban forest, waste and household waste in surface water management, forestry operations on ground water, motor vehicles and transportation on the management of air, and fishing activities in coastal management. Learned also that industrial activities give affects and impact in all environmental management. Industrial activities have a broad impact on the environment.

Management of green open space (RTH) is based on the perception of the respondents are good with 67.37% of respondents, the management of urban forests classified as ordinary or simply by 34.55% of respondents, according to the perception of surface water is a good 59.09% of respondents. Perception of 60.91% of respondents to the management of groundwater is good, while as many as 61.82% of respondents said air management and as much as 53.64% of respondents said coastal management is good.

Efforts toward improvement by the community activities in the role in environmental management, that are: (1) Reduce or restrict the use of electronic equipment, (2) Reduce or restrict the use of clean water, (3) Purchase of environmentally friendly products, (4) Recycling waste household, (5) Plant a tree in the neighborhood (afforestation / reforestation), (6) Participate in managing the environment well, (7) Use of public transportation services in order to reduce pollution levels.

Keywords: Environment, perception, environmental management, Pressure-State-Response, Semarang

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat persepsi masyarakat dalam menilai tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kota Semarang dilihat dari Tekanan (*Pressure*) yaitu tekanan yang terjadi terhadap lingkungan sebagai akibat dari hasil kegiatan manusia. Kondisi (*State*), yaitu keadaan pengelolaan lingkungan sebagai pengaruh dari kegiatan yang dilakukan pada lingkungan. Respon (*Response*) yaitu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dampak terhadap tekanan dan kondisi lingkungan dilihat dari peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup alami (Kenneth, et al, 2008 dan OECD, 2001,2003,2008). Indikator atau obyek yang menjadi penelitian yaitu ruang terbuka hijau (RTH), hutan kota, air permukaan, air tanah, udara, dan pesisir (BLH, 2010). Serta memberikan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk diterapkan.

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengambilan sampel menggunakan *Purposive Quoted Sampling*. Responden yang diambil sebagai sampel adalah masyarakat Kota Semarang sebanyak 110 orang untuk responden masyarakat, dan 8 orang responden *key persons*. Metode analisis yang digunakan adalah *mixed method* dengan pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah statistik deskriptif dan pendekatan kualitatif dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan wawancara mendalam dengan responden *key persons*.

Hasil identifikasi terhadap tekanan, bahwa yang paling menjadi tekanan bagi pengelolaan lingkungan adalah aktivitas pertumbuhan pemukiman penduduk pada pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan hutan kota, Sampah dan limbah rumah tangga pada pengelolaan air permukaan, kegiatan kehutanan pada air tanah, kendaraan bermotor dan transportasi pada pengelolaan udara, dan kegiatan penangkapan ikan pada pengelolaan pesisir. Didapat pula bahwa aktivitas industri ternyata mempengaruhi semua pengelolaan lingkungan. Aktivitas industri memiliki dampak yang luas terhadap lingkungan.

Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan persepsi sebanyak 67,37% responden masyarakat dari total sampel menyatakan masih bagus, sebanyak 34,55% responden masyarakat menyatakan pengelolaan hutan kota tergolong biasa atau cukup, air permukaan menurut persepsi sebanyak 59,09% responden masyarakat adalah bagus. Persepsi 60,91% responden masyarakat terhadap pengelolaan air tanah adalah bagus, sedangkan sebanyak 61,82% responden masyarakat menyatakan pengelolaan udara dan sebanyak 53,64% responden masyarakat menyatakan pengelolaan pesisir adalah bagus.

Upaya kearah perbaikan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berperan pada pengelolaan lingkungan antara lain dengan : (1) Mengurangi atau membatasi penggunaan alat elektronik; (2) Mengurangi atau membatasi penggunaan air bersih; (3) Membeli produk yang ramah lingkungan; (4) Mendaur ulang sampah rumah tangga; (5) Menanam pohon di lingkungan sekitar (penghijauan/reboisasi); (6) Ikut mengelola lingkungan dengan baik; (7) Menggunakan jasa transportasi umum dalam rangka mengurangi tingkat polusi. Peran serta masyarakat,

pemerintah, dan stakeholders secara bersama-sama dalam pengelolaan lingkungan perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, persepsi, pengelolaan lingkungan, *Pressure-State-Response*, Semarang



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Persepsi Publik Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Semarang” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S-1 pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Skripsi ini merupakan sebuah karya yang tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Moh. Nasir, M.Si, Akt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dra. Indah Susilowati, M.Sc, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan segala bimbingan, arahan, petunjuk, kemudahan, serta ilmu bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Nenik Woyanti, S.E., M.Si selaku dosen wali dan seluruh dosen jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas semua ilmu pengetahuan yang telah diberikan.
4. Bapak Prof. Drs. Waridin, MS. Ph.D, dan Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP. selaku provider *Fast Track* yang telah memberikan kesempatan, ilmu dan nasehat, serta dukungan semangat.

5. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Mohamad, S.E dan Ibu Endang Supriati, SPd, terima kasih untuk kasih sayang, perhatian, serta doa di setiap langkahku. Adikku tersayang Dwi Novitasari, serta semua keluarga yang memberikan semangat.
6. Ibu Nora, Ir Endang P, dan Bu Rini selaku para kepala bidang di Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, serta Ir. Agus Hadiyanto MT Dosen Magister Ilmu Lingkungan UNDIP, yang telah banyak membantu memberikan masukan kepada penulis dalam membuat skripsi ini.
7. Seluruh responden dan *Keyperson* yang telah bersedia meluangkan waktunya membantu penulis untuk pengumpulan data skripsi ini.
8. Keluarga besar dari Mayanggita Kirana S.E., MSi dan Gita Soraya (Pak Widi, Bu Endang, dan Mas Adit), keluarga besar dari Hesti (Pak Dadang, Mb. Danti), keluarga besar dari Etty (Pak Miftah, Bu Nur), dan keluarga besar dari Lensia, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan dan kemurahan hati untuk menampung penulis saat-saat susah maupun senang dan telah bersedia menjadi keluarga bagi penulis.
9. Sahabat-sahabatku: Nina, Rully, Nissa, Nurin, Vinda, Norma, Anin, Vina, Linda, Lina, yang telah menjadi keluargaku dalam menggapai cita-cita. Semoga hati kita senantiasa terpaut selamanya dalam persahabatan ini.
10. Sahabat terbaikku D’Pupping : Dicky, Tintan, Azhar, Bella, Mb Ifa, Hera, Mahocca. *‘yang penting dolannya ga keter, dan lancarkan pup’*, Persahabatan yang terbentuk karena kesamaan dan segala perbedaan masing-masing dengan tujuan mencapai kesuksesan. *Love u all guys.*

11. Teman-Teman: Rian, Anan, Yopy, Asol, atas “*adventures*” yang kita lakukan.
Noval, Fitri, Aghadita, Arum, Ismi, serta Teman-teman Jurusan IESP Angkatan 2008 atas kerjasama, bantuan, serta kekompakannya “IESP Ceria”.
12. Teman-teman KKN Desa Jerukwangi: Fuad, Tyass, Sita, Hesti A, Lilik, Handu, Nurul, “*another family which built in 35 days*”.
13. Teman-teman MIESP BU *Fast Track*, BU Reguler, maupun MIESP Reguler, terimakasih atas kebersamaan, kekompakan, dan bantuannya di MIESP.
14. Segenap staf dan karyawan FE UNDIP, IESP, dan MIESP, atas bantuannya, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan.

Semarang, 21 Juni 2012

Penulis

Indah Fitri Purwanti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
1.4. Sistematika Penulisan	19
BAB II TELAAH PUSTAKA	21
2.1. Landasan Teori	21
2.1.1. Ekonomi Lingkungan	22
2.1.2. Kualitas Lingkungan	24
2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan	25
2.1.4. Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan	28
2.1.5. Indikator Lingkungan Hidup	29
2.1.6. Persepsi Masyarakat	33
2.2. Penelitian Terdahulu	35
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	40
3.2. Penentuan Populasi dan Sampel	41
3.3. Jenis dan Sumber Data	42
3.3.1. Data Primer	42
3.3.2. Data Sekunder	43
3.4. Metode Pengumpulan Data	43
3.5. Metode Analisis	45
3.5.1. Penentuan Indikator <i>Pressure-State-Response</i>	45
3.5.2. Persepsi Masyarakat Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1. Deskripsi Obyek Penelitian	48
4.1.1. Gambaran Daerah Penelitian	48
4.1.2. Lokasi Penelitian	49
4.1.3. Profil Responden	51
4.1.1. Profil Sosial Ekonomi Responden Masyarakat	51

	4.1.2. Profil responden <i>Key Person</i>	54
4.2.	Analisis Data	56
	4.2.1. Kondisi Lingkungan Hidup Kota Semarang	56
	4.2.2. Pengelolaan Lingkungan Hidup	62
	4.2.3. Persepsi Masyarakat Mengenai Tekanan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	64
	4.2.4. Persepsi Masyarakat Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	73
	4.2.5. Persepsi Masyarakat Mengenai Upaya Ke Arah Perbaikan	79
	4.3. Interpretasi Hasil.....	80
BAB V	PENUTUP.....	85
	5.1. Simpulan	85
	5.2. Keterbatasan	86
	5.3. Saran	86
	DAFTAR PUSTAKA	88
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Kota Semarang	7
Tabel 1.2 Jumlah Personil Institusi Lingkungan Menurut Tingkat Pendidikan BLH Kota Semarang Tahun 2010.....	8
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2005 – 2010.....	8
Tabel 1.4 Rasio Fasilitator Terhadap Populasi Pada Tahun 2010	9
Tabel 1.5 Kualitas Udara di Kota Semarang	12
Tabel 1.6 Persepsi Key Persons dan Responden Masyarakat Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Semarang	17
Tabel 3.1 Sampel Penelitian.....	42
Tabel 4.1 Karakteristik Responden.....	52
Tabel 4.2 Pemeriksaan Udara Ambien Kota Semarang pada Kawasan Industri	61
Tabel 4.3 Tekanan Bagi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Persepsi Responden Masyarakat.....	65
Tabel 4.4 Rata-Rata Persepsi Masyarakat Mengenai Upaya Ke Arah Perbaikan.....	79
Tabel 4.5 Respon Upaya Pengelolaan yang Dilakukan oleh Masyarakat.....	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Presentase Luas Ruang Terbuka Hijau dari Luas Kota Semarang	10
Gambar 1.2 Foto Penebangan Pohon dan Pengerukan Lahan di Kota Semarang	11
Gambar 1.3 Kualitas Sungai Garang Semarang (mg/l)	12
Gambar 1.4 Foto Kondisi Sungai dan Pesisir di Kota Semarang.....	13
Gambar 2.1 Diagram Kurva Kuznet	26
Gambar 2.2 Kerangka Kerja Penyusunan Indikator Pembangunan Berkelanjutan.....	29
Gambar 2.3 Kerangka Kerja Pressure-State-Response dari OECD.....	20
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	39
Gambar 4.1 Gambar Daerah Penelitian	50
Gambar 4.2 Persepsi Responden Masyarakat Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Semarang	56
Gambar 4.3 Persepsi Tekanan pada Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Responden Masyarakat	67
Gambar 4.4 Persepsi Tekanan pada Pengelolaan Hutan Kota Berdasarkan Responden Masyarakat.....	68
Gambar 4.5 Persepsi Tekanan pada Pengelolaan Air Permukaan Berdasarkan Responden Masyarakat.....	69
Gambar 4.6 Persepsi Tekanan pada Pengelolaan Air Tanah Berdasarkan Responden Masyarakat.....	70
Gambar 4.7 Persepsi Tekanan pada Pengelolaan Udara Berdasarkan Responden Masyarakat.....	71
Gambar 4.8 Persepsi Tekanan pada Pengelolaan Pesisir Berdasarkan Responden Masyarakat.....	72
Gambar 4.9 Persepsi Masyarakat Mengenai Pengelolaan RTH.....	74

Gambar 4.10 Persepsi Masyarakat Mengenai Pengelolaan Hutan Kota.....	75
Gambar 4.11 Persepsi Masyarakat Mengenai Pengelolaan Air Permukaan..	76
Gambar 4.12 Persepsi Masyarakat Mengenai Pengelolaan Air Tanah.....	77
Gambar 4.13 Persepsi Masyarakat Mengenai Pengelolaan Udara	77
Gambar 4.14 Persepsi Masyarakat Mengenai Pengelolaan Pesisir.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Lembar Kuesioner Penelitian	92
Lampiran B	Ringkasan Data Mentah Responden Masyarakat.....	97
Lampiran C	Peta dan Dokumentasi.....	106
Lampiran D	Transkripsi Wawancara dengan <i>Key Persons</i>	115
Lampiran E	<i>Curriculum Vitae</i> Peneliti	136

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pada dasarnya Pembangunan Berkelanjutan adalah Pembangunan yang dilakukan pada saat ini dan masa mendatang tanpa mengorbankan dan tanpa merugikan kepentingan generasi mendatang serta tidak merugikan lingkungan yang berlangsung secara terus-menerus (Sukanto, 2000). Pada saat sekarang ataupun pada saat nantinya upaya pengelolaan lingkungan tetap harus diusahakan dengan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang mantap.

Lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan mulai dikenal di kalangan pemerintah di dunia ini pada tahun 1972, dan sejak itu mulai dirintis berbagai langkah mengembangkan pola pembangunan yang tidak merusak lingkungan. Konferensi PBB untuk lingkungan hidup Juni 1972 di stockholm, Swedia, telah menetapkan pada 5 Juni setiap tahunnya untuk diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia, juga merupakan titik awal berkembangnya paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kemudian dengan disepakatinya Agenda 21 di Rio de Janeiro pada 1992 serta konferensi-konferensi lingkungan hidup di tahun-tahun berikutnya, menunjukkan bahwa masyarakat global sangat memperhatikan lingkungan dan berkomitmen untuk memperbaikinya melalui pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek pertumbuhan ekonomi, keharmonisan sosial dan kelestarian lingkungan. Indonesia baru secara eksplisit memuatkan pertimbangan lingkungan hidup dalam

pembangunan sejak tahun 1960-an. Dan sejak itu diusahakan berbagai alat kebijakan pembangunan yang mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif pembangunan terhadap lingkungan (Suparmoko, 2000).

Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Uni Eropa dan juga Jepang agenda program penyelamatan, pemeliharaan dan pelestarian serta perlindungan lingkungan menjadi prioritas utama sejajar dengan agenda program pembangunan di bidang ekonomi, politik dan pertahanan mereka. Alokasi anggaran dan perangkat kelembagaan untuk penanganan masalah lingkungan dan kerusakan sumberdaya alam (SDA) juga disiapkan sangat memadai (White, 2005).

Adapun di negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia walaupun masalah lingkungan pada umumnya sudah ditangani oleh kementerian tersendiri yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, namun prioritas penanganannya sering kali tidak utama. Demikian pula dengan alokasi anggaran dan perangkat kelembagaan yang disiapkan pada umumnya sangat terbatas. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi negara dan sosial-ekonomi-budaya masyarakatnya. Menurut Drexhage (2010), di negara-negara maju kondisi negaranya relatif stabil dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya relatif jauh lebih baik, tingkat pendapatan relatif tinggi, kemiskinan dan pengangguran juga relatif rendah, sehingga sikap dan perilaku masyarakatnya relatif lebih tanggap, santun dan peduli, aktif bahkan proaktif serta kritis terhadap masalah-masalah lingkungan yang terjadi di sekitarnya, bahkan yang terjadi di luar negaranya. Sebaliknya, di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, kondisi negara pada

umumnya tidak atau belum stabil dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya relatif miskin, tingkat pendapatan rendah, tingkat pengangguran tinggi, sehingga sikap dan perilaku masyarakatnya relatif kurang peduli, pasif dan cenderung anarkistis (kurang beradab) terhadap masalah-masalah lingkungan yang terjadi di sekitarnya, bahkan cenderung menjadi bagian dari tambah rumitnya masalah lingkungan tersebut, seperti perambahan hutan, pemukiman kumuh di perkotaan dan bantaran sungai dan lain-lain.

Indonesia memiliki kekayaan lingkungan dan sumberdaya alam sangat besar, tapi ragam nilai budaya yang dipunyai masyarakat cenderung meremehkannya dan menganggap sebagai suatu kewajaran (Tri Pranadji, 2005). Kondisi saat ini menunjukkan telah terjadi penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan yang cukup signifikan. Aktivitas pembangunan yang dilakukan nyatanya telah mengganggu atau mengubah kondisi lingkungan hidup ke arah yang tidak lestari. Meskipun alam diciptakan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran manusia, namun bukan berarti alam boleh dieksploitasi secara semena-mena tanpa memperhatikan kemampuan alam untuk memulihkan diri dari keterbatasan potensinya (BPS, 2009).

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup telah ada dan menjadi perhatian di Indonesia. Kebijakan pengelolaan hidup berkembang secara bertahap dilatar

belakangi oleh masalah yang terjadi, serta kesadaran masyarakat dalam hubungannya dengan pembangunan, kesejahteraan umat manusia dan lingkungan.

Ada 3 (tiga) penyebab terjadinya kerusakan lingkungan yaitu: pertama, tidak terkendalinya nilai-nilai keserakahan yang mengiringi kegiatan pembangunan ekonomi yang berwatak kapitalistik (rakus). Kedua, tidak mempunya kalangan berpengetahuan meyakinkan penyelenggara negara untuk membangun masyarakat mandiri yang cerdas (*smart civil society*), yang menempatkan aspek pengelolaan lingkungan secara kolektif pada posisi yang strategis. Ketiga, relatif besarnya kelompok lapisan masyarakat miskin yang kehidupannya sangat tergantung pada sumber-sumber daya alam dan lingkungan (Tri Pranadji, 2005). Berulangnya bencana lingkungan selama ini nampaknya dipicu oleh penanganan sesaat ketika terjadi bencana tanpa disertai langkah proaktif, sistematis, dan komprehensif dalam menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan.

Dalam pembangunan berwawasan lingkungan, ada 3 syarat yang harus dipenuhi dari aspek ekonomi, aspek sosial budaya (sosbud), dan aspek ekologi (lingkungan), (BPS, 2009). Untuk aspek ekonomi, syarat yang harus dipenuhi adalah pembangunan harus bernilai ekonomis dengan memperhatikan kelayakan suatu proyek. Untuk aspek sosial budaya, syarat yang harus dipenuhi adalah kesesuaian pembangunan dengan kondisi sosial budayanya. Jika sesuai dengan kondisi sosial budayanya, maka hasil pembangunan tersebut akan bermanfaat secara optimal. Sebaliknya jika masyarakat secara sosial budaya belum siap, maka hasil pembangunan akan sia-sia. Untuk aspek lingkungan, syarat yang harus

dipenuhi adalah adanya kajian awal Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan hubungannya dengan proyek pembangunan.

Seiring dengan peningkatan laju pembangunan ekonomi, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan penduduk pun mengalami peningkatan, dan kebutuhan untuk memenuhi konsumsi masyarakat juga meningkat. Masalah lingkungan hidup yang terjadi saling terkait satu sama lain. Kerusakan hutan akibat pembabatan hutan, misalnya, tidak hanya berdampak pada terjadinya erosi, banjir, dan wilayah hutan yang rusak, tetapi juga bisa merusak sistem tata air dan hujan, serta mengakibatkan pemanasan global di wilayah regional bahkan di belahan bumi lainnya. Oleh karena itu, penurunan kualitas hidup yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan yang dilakukan di suatu daerah perlu diawasi seberapa jauh pembangunan tersebut mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Drexhage, 2010).

Menurut Levrel, et al (2009) Pembangunan berkelanjutan boleh dibandingkan dengan suatu tujuan yang baik, semua orang setuju dengan hal tersebut. Masalahnya adalah tidak semua orang benar-benar tahu bagaimana mencapai pembangunan berkelanjutan tersebut. Oleh karena itu indikator pembangunan berkelanjutan dibutuhkan untuk mengidentifikasi tujuan tersebut. Melalui *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2001,2003,2008), berhasil mengembangkan dan menginovasi kerangka kerja *Pressure-State- Response* (PSR). Tujuan kerangka kerja indikator PSR adalah untuk mengevaluasi tekanan (*pressure*) dari aktivitas manusia pada kondisi (*state*)

lingkungan dan untuk memunculkan upaya respon (*response*) dengan tujuan untuk kembali ke kondisi lingkungan yang baik.

Menurut Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Semarang (2010), sejalan dengan laju pembangunan nasional, permasalahan lingkungan hidup Kota Semarang yang saat ini sering dihadapi adalah mengenai pengelolaan pada: (1) Ruang Terbuka Hijau, (2) Hutan Kota, (3) Air permukaan, (4) air tanah, (5) Udara, (6) Pesisir.

Tanggal 8 September 2009, rapat paripurna DPR mengesahkan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai pengganti UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai UU No. 32 Tahun 2009 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Sudharto P Hadi, 2010). Dengan adanya UU PPLH diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lestari dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan adanya UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah dan UU no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dalam bidang lingkungan hidup memberikan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dari tingkat provinsi dan pada lingkup kewenangan terkecil yaitu pada tingkat kabupaten/kota.

Tabel 1.1
Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rp)

No	Tahun	Indonesia	Jawa Tengah	Kota Semarang			
				APBD	APBN	Total	Pertumbuhan
1	2005	-	-	717,015,000	0	717,015,000	0
2	2006	-	-	738,872,000	0	738,872,000	3.05%
3	2007	7,902,933,000,000	12,145,000,000	1,069,504,000	204,840,000	1,274,344,000	72.47%
4	2008	8,308,532,000,000	21,089,000,000	1,298,160,000	189,840,000	1,488,000,000	16.77%
5	2009	8,833,888,000,000	21,255,000,000	1,201,104,000	1,260,368,000	2,461,472,000	65.42%
6	2010	9,301,628,000,000	21,746,000,000	1,774,789,000	3,056,070,000	4,830,859,000	96.26%

tanda (-) : data tidak diketahui rincian anggaran untuk pengelolaan lingkungan

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2010

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa anggaran pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dan Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2007 hingga tahun 2010. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup Kota Semarang berasal dari APBD dan APBN juga mengalami peningkatan dari tahun 2005 hingga tahun 2010. Bahkan pada tahun 2010 peningkatannya cukup drastis yaitu sebesar 96,26% dari Rp. 2.461.508.000,00 pada tahun 2009 naik menjadi Rp. 4.830.859.000,00 pada tahun 2010. Meningkatnya anggaran pengelolaan lingkungan dapat mengindikasikan bahwa perhatian pemerintah terhadap pengelolaan lingkungan hidup meningkat tiap tahunnya.

Pada tingkatan pemerintahan kota, pengelolaan lingkungan hidup di Kota Semarang berada dibawah kewenangan Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang. Dari tabel 1.2 diketahui bahwa jumlah total pegawai di BLH Kota Semarang adalah 47 orang, yaitu 19 orang laki-laki dan 28 orang perempuan. BLH Kota Semarang diharapkan untuk bisa menjadi institusi yang responsif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di Kota Semarang. Namun,

pengelolaan Lingkungan Hidup tidak serta merta menjadi tanggung jawab pemerintah dan dinas terkait saja (BLH), tapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Kota Semarang.

Tabel 1.2
Jumlah Personil Institusi Lingkungan Menurut Tingkat Pendidikan BLH
Kota Semarang Tahun 2010

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Prosentase
		Laki-Laki	Perempuan		
1	SD	0	0	0	0
2	SLTP	0	0	0	0
3	SLTA	5	4	9	19%
4	Diploma	2	1	3	6%
5	Sarjana	9	20	29	62%
6	Master	3	3	6	13%
7	Doktor	0	0	0	0
Total		19	28	47	100%

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2010

Dari tabel 1.3, diketahui bahwa pada tahun 2010 jumlah penduduk Kota Semarang sebesar 1.527.433 jiwa terdiri dari 758.267 penduduk laki-laki dan 769.166 penduduk perempuan, dan dengan pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,45%.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2005-2010

Tahun	Banyaknya Penduduk			Pertumbuhan
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
2005	705,627	713,851	1,419,478	0
2006	711,755	722,270	1,434,025	1.02%
2007	722,026	732,568	1,454,594	1.43%
2008	734,930	745,700	1,480,630	1.79%
2009	748,515	758,409	1,506,924	1.78%
2010	758,267	769,166	1,527,433	1.36%

Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2010

Dengan jumlah penduduk Kota Semarang tersebut, Masyarakat Kota Semarang diharapkan untuk dapat mengenali kondisi lingkungan hidup di Kota Semarang. Masyarakat juga diharapkan dapat menilai pengelolaan lingkungan hidup yang ada dan ikut ambil bagian dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 1.4
Rasio Fasilitator Terhadap Populasi Pada Tahun 2010

Keterangan	Jumlah (jiwa)
Fasilitator	47
Populasi	1,527,433
Rasio fasilitator : populasi	32,499

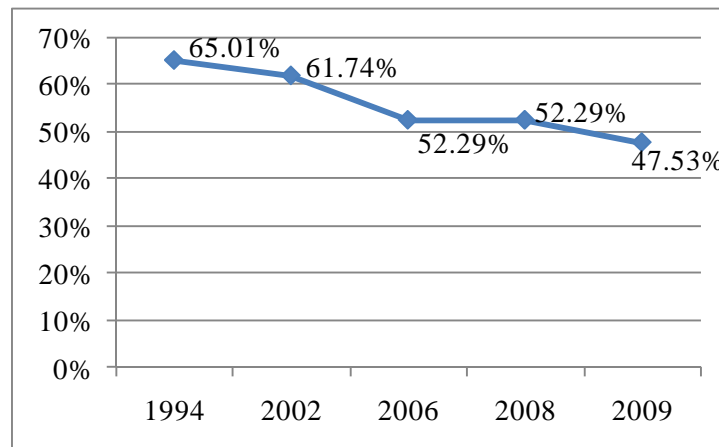
Sumber: perhitungan antara tabel 1.2 dan tabel 1.3

Pada Tabel 1.4 dapat dilihat jumlah fasilitator yang tersedia dalam pengelolaan lingkungan jika di bandingkan dengan jumlah populasi yang ada di Kota Semarang adalah 1 : 32499, yang mana berarti bahwa setiap 1 orang fasilitator di Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang bertanggung jawab terhadap 32.499 jiwa. Angka tersebut jika dilihat maka dapat diketahui bahwa tidaklah mudah untuk petugas/fasilitator untuk memberikan pengetahuan maupun mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh penduduk Kota Semarang yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Dewasa ini di Kota Semarang, aktifitas pembangunan yang dilakukan telah mengganggu atau mengubah kondisi lingkungan hidup ke arah yang tidak lestari. Hal ini terjadi karena adanya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara terus menerus tanpa melihat dampak atau kerusakan yang ditimbulkan, juga dikarenakan paradigma pengelolaan lingkungan yang masih konvensional, yaitu pengelolaan dilakukan setelah adanya kerusakan atau

penurunan kualitas lingkungan hidup yang terjadi tanpa ada upaya pencegahan sebelumnya.

Gambar 1.1.
Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau dari Luas Kota Semarang



Sumber: Status Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2010

Dapat dilihat dari Gambar 1.1., bahwa luas Ruang Terbuka hijau di Kota Semarang berkurang dari 65.01% dari luas Kota Semarang pada tahun 1994 menjadi 61.74% dari luas Kota Semarang pada tahun 2002. Kemudian menjadi 52.29% dari luas Kota Semarang pada tahun 2006 sampai tahun 2008, dan berkurang lagi menjadi 47.53% dari luas Kota Semarang pada tahun 2009. Meskipun masih termasuk dalam kategori yang baik yaitu ruang terbuka hijau masih lebih dari 30% luas total wilayah, namun penurunan presentase luas ruang terbuka hijau perlu diperhatikan. Berdasarkan data Status Lingkungan Hidup Kota Semarang (BLH, 2010), luas hutan di Kota Semarang juga mengalami penurunan dari 7965.1 ha pada tahun 2008 menjadi 7123.05 ha pada tahun 2009. Hal ini

dikarnakan adanya penebangan hutan guna untuk di alih fungsikan untuk pembangunan jalan tol dan juga perumahan.

Gambar 1.2.
Foto Penebangan Pohon dan Pengerukan Lahan di Kota Semarang



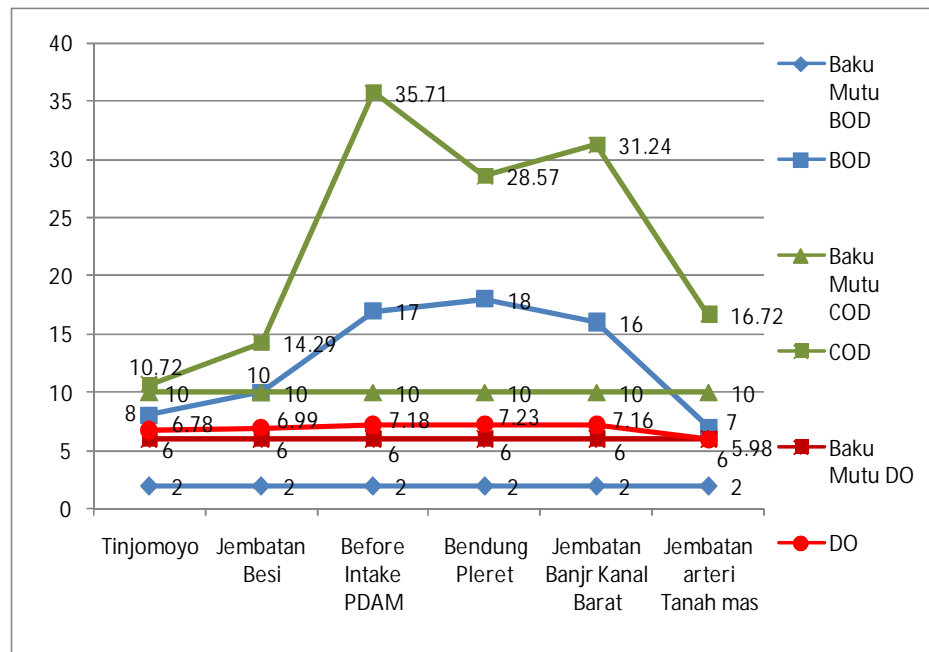
Survey Primer : foto diambil di kecamatan Tembalang pada Kamis, 26 April 2012

Gambar 1.2 merupakan gambar penyebab dari berkurangnya ruang terbuka hijau dan hutan kota di Semarang. Pertambahan penduduk di Kota Semarang menuntut adanya penambahan pemukiman, berdasarkan keterangan panel ahli dan survey yang dilakukan dilapangan penambahan pemukiman dilakukan dengan pembukaan hutan dan pengerukan terutama di daerah selatan Kota Semarang sehingga mengurangi luas ruang terbuka hijau dan luas hutan kota. Apabila pengelolaan ruang terbuka hijau dan hutan kota terus seperti ini, yaitu dialih fungsikan menjadi permukiman, hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yaitu ruang terbuka hijau dan hutan tidak dapat menopang kota yang mana dapat menimbulkan terjadinya banjir.

Di Kota Semarang dilalui oleh beberapa sungai, yang utama adalah Sungai Garang dan Sungai Babon. Kualitas air permukaan atau sungai di Kota Semarang telah melewati batas baku mutu. Pada Gambar 1.3 kadar BOD, COD,

dan DO di Sungai Garang berada di atas baku mutu, yang menunjukkan bahwa kualitas air sungai buruk dan terjadi pencemaran di sungai tersebut.

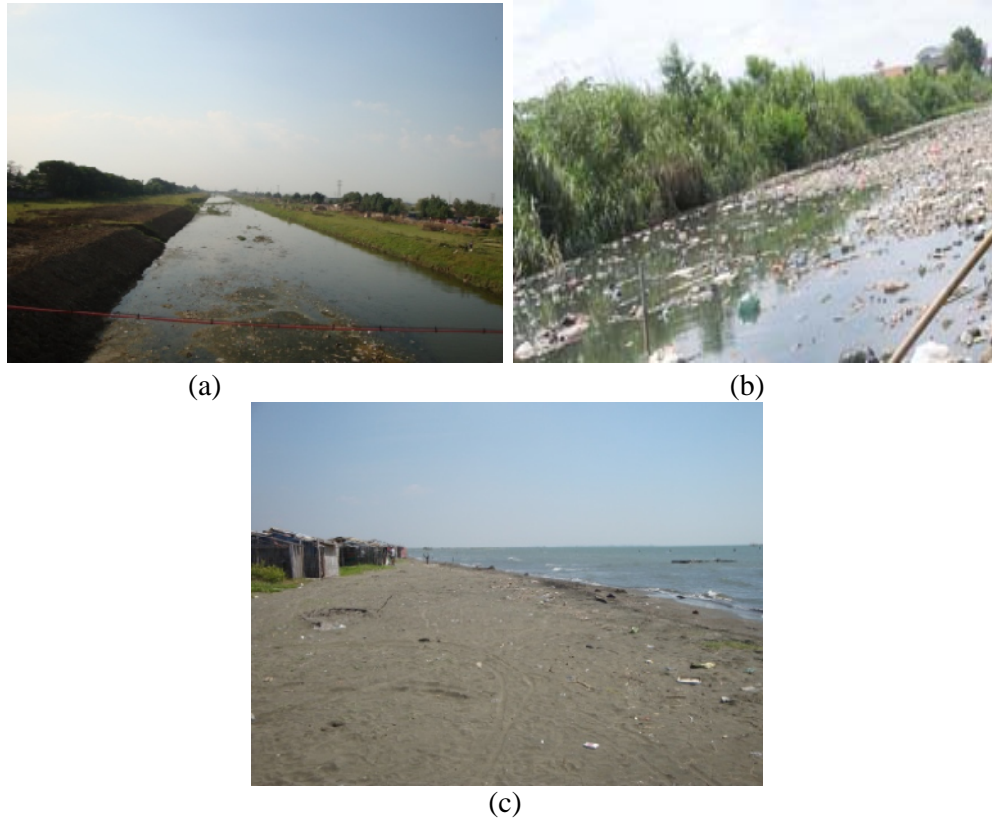
Gambar 1.3.
Kualitas Sungai Garang Semarang (mg/l)



Sumber: Status Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2010

Pada Gambar 1.4 terlihat bahwa sungai di Kota Semarang tidak bersih dan tercemar. Pencemaran sungai tersebut juga dapat dilihat terutama adalah adanya sampah masyarakat yang dibuang ke sungai. Ketidakpedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup terlihat dalam Gambar 1.4, masyarakat yang tidak peduli pada lingkungan cenderung membuang sampah ke sungai sehingga terjadi penumpukan sampah dan pencemaran pada air permukaan di Kota Semarang. Di pesisir pantai Maron pun tidak jauh berbeda, sampah-sampah berserakan dan bangunan-bangunan yang tidak terawat terlihat di sepanjang pantai membuat sepanjang pesisir maron terlihat kotor dan kumuh.

Gambar 1.4.
Foto Kondisi Sungai dan Pesisir di Kota Semarang



Survey Primer : Kamis, 26 April 2012

Keterangan : Foto (a) adalah kondisi Sungai Banjir Kanal Timur, foto (b) adalah sungai di daerah hilir menuju Pantai Maron. Foto (c) merupakan foto pesisir di Kota Semarang (Pantai Maron).

Tabel 1.5
Kualitas Udara di Kota Semarang

NO	PARAMETER	UNIT	BAKU MUTU	TAHUN		Peningkatan
				2010	2011	
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/Nm ³	632	27.2	11.8	-15.4
2	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/Nm ³	316	26.2	45.5	19.3
3	Karbon Monoksida (CO)	µg/Nm ³	15,000	5,721.3	3896.06	-1825.24
4	Hidrokarbon	µg/Nm ³	160	31.8	65.44	33.64
5	Total Partikel Debu (TSP)	µg/Nm ³	230.0	172.3	265.9	93.6

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2011

Kualitas udara di Kota Semarang hanya TSP yang melebihi baku mutu, tapi dapat dilihat bahwa kadar NO_2 , CO, dan TSP mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011. Meningkatnya kadar tersebut dalam udara menunjukkan bahwa kualitas udara di Kota Semarang menurun atau pencemaran pada udara meningkat.

Kerusakan lingkungan hidup tersebut disebabkan oleh beberapa hal (Otto Soemarwoto, 2005). Pertama, antara gambaran lingkungan dengan keadaan lingkungan yang nyata selalu terdapat perbedaan. Perbedaan ini menyebabkan ketidaksempurnaan dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini terutama terdapat dalam hal terjadi perubahan lingkungan yang tidak diketahui oleh masyarakat, sehingga kondisi lingkungan yang terlihat tetap tidak berubah meskipun sesungguhnya dalam kondisi lingkungan yang berubah. Pengelolaan lingkungan pun tidak berubah dan tidak sesuai dengan lingkungan yang telah berubah. Kedua, sering tanda kerusakan lingkungan tidak diketahui oleh masyarakat karena masyarakat menjadi terbiasa dan menyesuaikan diri dengan penurunan kualitas lingkungan yang terjadi secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang. Kerusakan itu baru disadari setelah terlambat. Ketiga, manusia tidak selalu bertindak rasional sesuai dengan persepsi lingkungan yang mereka miliki, terutama jika manusia harus memenuhi kebutuhan jangka pendek sehari-hari. Keempat, kerusakan lingkungan yang dikarenakan ketamakan. Misalnya orang yang membangun perumahan atau perhotelan di daerah yang menjadi resapan air ataupun merupakan daerah penghijauan. Tetapi karena ketidakpedulian dan karena tergiur oleh keuntungan yang besar orang tetap melakukannya.

Berbagai usaha untuk menjaga, mempertahankan, dan merehabilitasi kerusakan atau penurunan kualitas yang terjadi pada lingkungan, telah dilakukan oleh pemerintah dan dinas terkait. Misalnya pengukuran terhadap kualitas lingkungan, perbaikan lingkungan yang tergradasi, penyuluhan dan penambahan kurikulum lingkungan hidup di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi. Namun, pengelolaan lingkungan tidak serta merta hanya dilakukan oleh Pemda Kota Semarang tapi juga harus melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat. Masyarakat sebaiknya tahu mengenai kondisi lingkungan mereka, bagaimana pengelolaannya dan juga berperan serta dalam pengelolaan lingkungan bahkan dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, menggunakan air seperlunya, dan sebagainya.

Oleh karena itu perlu adanya analisis mengenai persepsi publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup melalui metode *Pressure-State-Response* (PSR) sebagai suatu alternatif pendekatan untuk mengetahui secara keseluruhan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, dan juga upaya untuk meningkatkan mutu pengelolaan lingkungan hidup dengan melihat prospek dari model pengelolaan yang ada agar dapat merekomendasikan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari untuk kedepannya (Kenneth F.D. Hughey, 2008). Analisis persepsi masyarakat mengenai pengelolaan melalui pendekatan PSR ini mencakup keseluruhan persepsi masyarakat mengenai kondisi kualitas lingkungan hidup, tekanan atau aktivitas yang mempengaruhi pengelolaan lingkungan, kondisi pengelolaan lingkungan hidup, dan respon tindak lanjut atau upaya yang dilakukan dengan stakeholders baik oleh pemerintah Kota Semarang dengan

masyarakat, pebisnis, maupun LSM dalam pelaksanaan program kegiatan pengelolaan lingkungan serta pengambilan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

1.2. Rumusan Masalah

Terjadinya pencemaran atau penurunan kualitas Lingkungan disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas lingkungan yang baik. Dengan kata lain, permasalahan lingkungan tidak semakin ringan namun justru akan semakin berat. Pembangunan ekonomi seperti pertumbuhan pemukiman penduduk yang mengalih fungsikan ruang terbuka hijau dan hutan kota memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang ada di suatu daerah menjadi suatu dilema bagi pemerintah daerah. Pembangunan ekonomi di suatu daerah cenderung menimbulkan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan hidup di suatu daerah tersebut. Berdasarkan keterangan dari badan lingkungan hidup Kota Semarang terjadi perubahan penutupan lahan. Luas penutupan lahan terbangun pada tahun 2000 adalah 11.130,52 ha, pada tahun 2009 menjadi 19.894,84 ha. Kota Semarang mengalami peningkatan lahan terbangun sebesar 8.764,32 ha atau sebesar 8%/th berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk di kota Semarang 1,65% per tahun. RTH mengalami penurunan 3,34% per tahun. Pembangunan tersebut juga tidak terlepas dari masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut khususnya dalam penelitian ini adalah Kota Semarang. Jumlah penduduk yang relatif besar di Kota Semarang menyebabkan Kota Semarang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi yaitu 40

jiwa/ha. Peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,65% dan pertumbuhan ekonomi masyarakat menyebabkan pembangunan fisik kota terus melaju dengan pesat. Peningkatan jumlah penduduk, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kota, kendaraan bermotor dan fasilitas kota lainnya menyebabkan produksi CO₂ di udara meningkat, luas ruang terbuka hijau (RTH) serta luas hutan kota di Kota Semarang berkurang pertahunnya.

Pada prakteknya pengelolaan lingkungan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang yaitu dengan cara pengelolaan dilakukan apabila ada laporan atau diketahui bahwa terjadi kerusakan pada lingkungan. Pengelolaan lingkungan dilakukan oleh Badan lingkungan Hidup Kota Semarang, masyarakat ikut andil dalam pengelolaan jika diselenggarakan acara oleh dinas atau pihak lain dan jumlahnya pun tidak terlalu banyak (hasil wawancara pra survey).

Tabel 1.6.
Persepsi Key Persons dan Responden Masyarakat Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Semarang

Responden	n	Kondisi Lingkungan Hidup ¹	Pengelolaan Lingkungan Hidup ¹	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan
Key Person ²	2	6 (Cukup/ Biasa)	6.5 (Cukup/ Biasa)	Peran Masyarakat masih minim, yaitu hanya jika diadakan acara oleh dinas atau pihak lainnya. Masyarakat baru ikut andil, itupun tidak banyak jumlahnya.
Masyarakat ³	5	7.9 (Bagus)	7.5 (Bagus)	Dari 5 responden menyatakan tidak pernah ikut andil dalam pengelolaan lingkungan hidup.

¹ Merupakan hasil olahan rata-rata persepsi dari responden dengan menggunakan skala konvensional
 1 _____ 5 _____ 7 _____ 10
 Sangat Kurang Biasa/cukup Bagus Sangat bagus

² Wawancara dengan Noramaning Istini, SP pada tanggal 23 Desember 2011 dan Ir Endang Pratiwiningsih, MSi pada tanggal 10 Januari 2012 (Kabid Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang)

³ Wawancara dengan masyarakat yang dipilih berdasarkan *purposive sampling*

Sumber: Berdasarkan Pra Survey pada Desember 2011

Dari hasil pra survey, persepsi masyarakat mengenai kondisi dan pengelolaan lingkungan di Kota Semarang belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari responden masyarakat yang menganggap bahwa kondisi dan pengelolaan lingkungan masih bagus, sedangkan berdasarkan *key person* kondisi dan pengelolaan lingkungan adalah cukup/biasa. Adanya perbedaan antara masyarakat dan ahli (*key person*) tersebutlah yang perlu diteliti lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat juga merasa tidak pernah ikut andil dalam pengelolaan lingkungan seperti dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Dengan demikian, pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kondisi serta tekanan yang terjadi pada lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Semarang?
2. Bagaimana tingkat persepsi masyarakat dalam menilai tentang pengelolaan lingkungan hidup?
3. Bagaimana upaya atau respon untuk meningkatkan mutu dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Semarang?
4. Bagaimana rekomendasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk diterapkan di Kota Semarang?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi publik mengenai pengelolaan lingkungan hidup di Kota Semarang dan menyusun

rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup di Kota Semarang. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi kondisi serta tekanan terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kota Semarang.
2. Menganalisis tingkat persepsi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
3. Memberikan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang tepat, khususnya untuk pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kota Semarang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penelitian sejenis, khususnya dalam kajian persepsi publik mengenai pengelolaan lingkungan hidup di Kota Semarang.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Pendahuluan, bab ini menjelaskan latar belakang masalah penelitian yang kemudian ditetapkan perumusan masalahnya. Bab ini juga menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan penjelasan teori-teori dan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian dan kerangka pemikiran.

Metode Penelitian, bab ini menjelaskan penentuan lokasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Hasil dan Pembahasan, bab ini menguraikan tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai hasil analisis.

Penutup, bab ini memuat kesimpulan dari hasil analisis data dan saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab ini juga berisi keterbatasan penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pengelolaan lingkungan yang baik dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat suatu aktivitas pembangunan. Tujuan dari pengelolaan terutama mencegah kemunduran sumber daya alam dan lingkungan yang ada dan mencegah pencemaran yang membahayakan. Pengelolaan lingkungan merupakan upaya yang dilakukan secara bertahap karena tindakan dalam pengelolaan diawali dengan: penyusunan rencana, disusul dengan tahap pelaksanaan yang berupa pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan. Tahap selanjutnya berupa pemulihan dan pengembangan lingkungan untuk menjaga kelestarian kualitas lingkungan (Imam Supardi, 2003).

Menurut World Bank (2008), pelaksanaan pengelolaan berada pada Kementerian Lingkungan Hidup di tingkat nasional dan juga oleh badan-badan pengelolaan lingkungan di daerah-daerah. Namun, investasi terbesar dan keputusan kebijakan yang mempengaruhi kualitas lingkungan justru dibuat oleh badan-badan pemerintahan yang lain seperti Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Departemen Transportasi, Departemen Kehutanan, dan lain-lain. Kebijakan-kebijakan lingkungan dan prosedur-prosedur dari berbagai pihak ini membutuhkan penguatan dan juga koordinasi diantara mereka, terutama terhadap dampak investasi dan kebijakan berskala besar.

Hukum dan aturan perundangan dilaksanakan dengan penekanan pada eksploitasi, bukan pada konservasi dan perlindungan. Pengelolaan lingkungan cenderung dilakukan sepenuhnya oleh badan atau dinas terkait yaitu Badan Lingkungan Hidup yang ada di daerah (BLH, 2011). Pengelolaan lingkungan di Indonesia di dasarkan pada Undang-Undang No 32 tahun 2009 yang diharapkan dapat menunjang pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup selama ini terutama difokuskan pada peningkatan kinerja lingkungan di bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan pencemaran. Pengelolaanpun dilakukan dengan cara menindaklanjuti apabila terjadi pencemaran pada lingkungan dan adanya pengaduan dari masyarakat apabila terjadi pencemaran. Dapat dilihat bahwa pengelolaan lingkungan secara konvensional merupakan upaya penanggulangan pencemaran yang terjadi. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih sangat rendah. Pengambilan keputusan dalam rencana pengelolaan lingkungan tidak secara penuh meminta pendapat dari publik dan hanya melibatkan dinas terkait (World Bank, 2008).

2.1.1 Ekonomi Lingkungan

Ekonomi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memanfaatkan lingkungan sedemikian rupa sehingga fungsi atau peranan lingkungan dapat dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan dalam penggunaannya untuk jangka panjang (Suparmoko, 2000).

Dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan berkembangnya waktu dan semakin meningkatnya pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan manusia, fungsi/peranan lingkungan telah menurun dari waktu ke waktu; artinya jumlah bahan mentah yang dapat disediakan lingkungan alami telah semakin berkurang karena terlalu banyaknya limbah yang harus ditampung melebihi daya tampung lingkungan, dan kemampuan alam menyediakan kesenangan dan kegembiraan langsung juga semakin berkurang karena banyak sumberdaya alam dan lingkungan yang telah diubah fungsinya atau karena meningkatnya pencemaran (Suparmoko, 2000). Manusia mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan disebabkan karena sifat atau ciri yang melekat pada lingkungan alami itu sendiri yaitu :

1. Sebagai barang publik

Barang publik mempunyai ciri utama sebagai berikut : a) tidak ada penolakan (*exclusion*) terhadap pihak atau orang yang tidak bersedia membayar dalam pengkonsumsian sumberdaya lingkungan tersebut. b) “*nonrivalry in consumption*” bagi sumberdaya lingkungan, artinya walaupun lingkungan itu telah dikonsumsi oleh seseorang atau sekelompok orang, volume atau jumlah yang tersedia bagi orang lain tidak akan berkurang.

2. Sebagai barang milik bersama atau milik umum (*common property*)

Kepemilikan bersama dapat diartikan sebagai bukan milik seorangpun atau juga milik setiap orang. Sistem pemilikan seperti itu akan membuat kecenderungan untuk timbulnya eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan secara berlebihan.

3. Eksternalitas

Eksternalitas muncul apabila seseorang melakukan suatu kegiatan dan menimbulkan dampak pada orang lain dapat dalam bentuk manfaat eksternal atau biaya eksternal yang semuanya tidak memerlukan kewajiban untuk menerima atau melakukan pembayaran.

2.1.2 Kualitas Lingkungan

Kualitas lingkungan dapatlah diartikan dalam kaitannya dengan kualitas hidup, yaitu dalam kualitas lingkungan yang baik terdapat potensi untuk berkembangnya kualitas hidup yang tinggi. Kualitas hidup dan kualitas lingkungan sifatnya adalah subyektif dan relatif. Kualitas hidup dapat diukur dengan tiga kriteria (Otto Soemarwoto, 2005).

Pertama, derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup sebagai makhluk hayati. Kebutuhan ini bersifat mutlak, yang didorong oleh keinginan manusia untuk menjaga kelangsungan hidup hayatinya.

Kedua, derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup manusiawi. Kebutuhan hidup ini bersifat relatif, walaupun ada kaitannya dengan kebutuhan hidup jenis pertama di atas. Di dalam kondisi iklim Indonesia rumah dan pakaian,

misalnya, bukanlah kebutuhan yang mutlak untuk kelangsungan hidup hayati, melainkan kebutuhan untuk hidup manusiawi.

Ketiga, Derajat kebebasan untuk memilih. Sudah barang tentu dalam masyarakat yang tertib, derajat kebebasan itu dibatasi oleh hukum, baik yang tertulis maupun tidak.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan

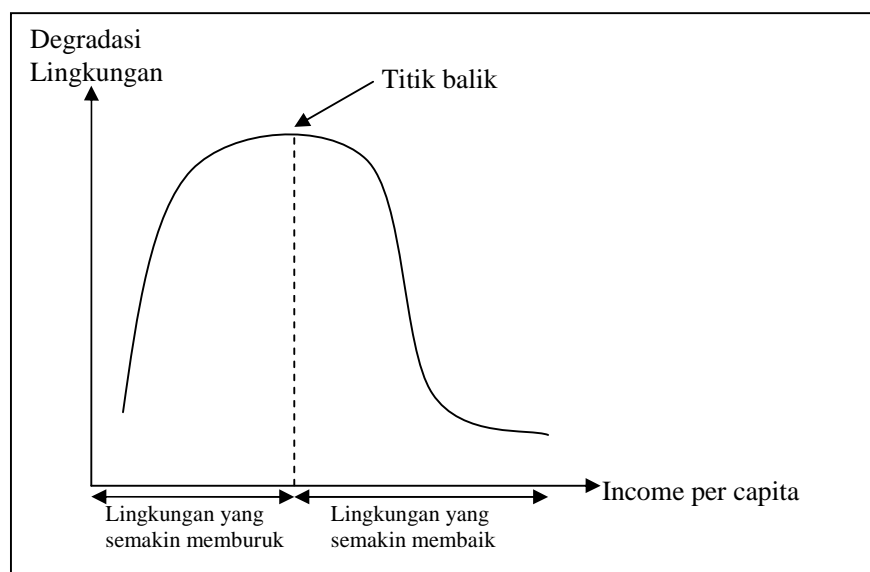
Pada umumnya, perhatian terhadap masalah lingkungan hidup bermula dari persepsi bahwa daya dukung sumber daya yang ada di bumi ini serba terbatas (Todaro, 2006). Ada semacam angka maksimal penduduk bumi yang jika dilampaui (artinya, seandainya jumlah aktual penduduk bumi melebihi sumber daya yang ada) maka kebutuhan hidup sebagian umat manusia tidak terpenuhi. Cepatnya pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang telah menyusutkan persediaan sumberdaya alam serta menimbulkan masalah-masalah degradasi lingkungan di daerah perkotaan. Demi memenuhi kebutuhan penduduk negara-negara Dunia Ketiga yang jumlahnya terus meningkat, segenap kecenderungan dan tindakan yang merusak lingkungan hidup harus dihentikan secepatnya. Selain itu, tingkat produktivitas sumber daya yang masih tersisa harus diselamatkan atau dilestarikan agar dapat mendukung aneka kebutuhan penduduk dunia.

Dalam Todaro (2006), menyebutkan bahwa para ekonom semakin menyadari betapa pentingnya implikasi-implikasi yang ditimbulkan oleh berbagai persoalan lingkungan hidup terhadap keberhasilan upaya-upaya pembangunan.

Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek pelestariannya dapat meningkatkan tekanan-tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mengancam semua penduduk di negara-negara Dunia Ketiga.

Pertumbuhan ekonomi dan lingkungan memiliki keterkaitan satu sama lain, dapat dilihat melalui kurva lingkungan Kuznet. Teori kurva lingkungan dari kuznet yang menghubungkan antara degradasi (penurunan) kualitas lingkungan hidup dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2006). Kurva Kuznet menunjukkan bahwa tingkat pencemaran lingkungan mengalami kenaikan dan kemudian mengalami penurunan atau titik balik, selaras dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Kurva Kuznet ini digambarkan dalam bentuk huruf U terbalik, sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Diagram kurva Kuznet



Sumber: Todaro, 2006

Gambaran dari kurva Kuznet, bahwa pada tahap awal pembangunan, masyarakat lebih tertarik misalnya pada mengkonsumsi makanan dari pada lingkungan yang bersih. Pada masyarakat dengan pendapatan rendah hanya mampu untuk melakukan konsumsi, dan masyarakat terlalu miskin untuk mampu membayar penurunan pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut menyebabkan degradasi lingkungan meningkat/penurunan kualitas lingkungan terjadi terus menerus. Logikanya adalah pada saat melakukan konsumsi masyarakat menggunakan banyak sumberdaya alam dan teknologi kotor sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan tanpa ada upaya penanggulangan.

Pada kurva Kuznet juga terlihat bahwa pada saat pendapatan masyarakat mulai naik, kualitas lingkungan akan menjadi lebih baik dan marginal utilitas konsumsi akan menurun. Hal ini mengisyaratkan bahwa masyarakat mulai menghargai lebih besar kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Ketika kualitas kehidupan meningkat sebagai hasil pembangunan, maka orang membutuhkan kualitas lingkungan yang lebih baik dan mendorong pemerintah agar menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungannya. Dalam kurva ditunjukkan pada rentang pendapatan menengah polusi mulai berhenti meningkat dan selanjutnya pada titik balik akan menurun selaras dengan kenaikan pendapatan masyarakat.

Dari gambar 2.1 dapat dilihat bahwa semakin meningkatnya pendapatan masyarakat yang berarti terjadinya pertumbuhan ekonomi, pada awalnya akan menimbulkan polusi. Namun, pada akhirnya akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup kembali karena semakin lama masyarakat cenderung

mengurangi kegiatan ekonomi yang menyebabkan eksternalitas, dan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan cenderung meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

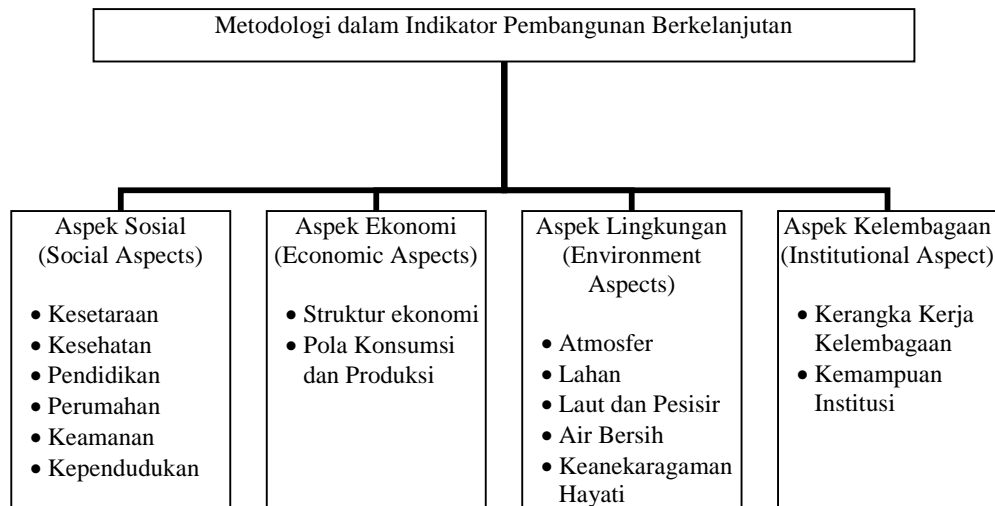
2.1.4 Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai “Pembangunan yang mengusahakan dipenuhinya kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka” (WCED, dalam Otto Soemarwoto, 2005). Pembangunan itu harus berwawasan lingkungan, yaitu lingkungan diperhatikan sejak pembangunan itu direncanakan sampai operasi pembangunan bahkan sampai pembangunan telah selesai dilaksanakan. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi harus berjalan selaras dengan kepentingan lainnya sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya memenuhi kepentingan generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang.

Komisi Pembangunan Berkelanjutan PBB, menyusun sebanyak 134 indikator pembangunan berkelanjutan, kemudian BPS menyusun kerangka kerja pengembangan indikator pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang disarankan oleh komisi pembangunan berkelanjutan PBB pada tahun 2001. Indikator tersebut sudah disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan keberadaan data pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada kerangka kerja dari PBB. Kerangka kerja yang disusun oleh Komisi Pembangunan Berkelanjutan PBB pada tahun 2001, antara lain mencakup (Indikator Pembangunan Berkelanjutan, 2009):

- a. Indikator pembangunan berkelanjutan untuk aspek sosial, terdiri atas : kesetaraan, kesehatan, pendidikan, perumahan, keamanan, dan kependudukan.
- b. Indikator pembangunan berkelanjutan untuk aspek ekonomi, terdiri atas : struktur ekonomi, serta pola konsumsi dan produksi.
- c. Indikator pembangunan berkelanjutan untuk aspek lingkungan, terdiri atas : atmosfer, lahan, laut dan pesisir, air bersih, serta keanekaragaman hayati.
- d. Indikator pembangunan berkelanjutan untuk aspek kelembagaan, terdiri atas: kerangka kerja kelembagaan, dan kemampuan institusi.

Gambar 2.2
Kerangka Kerja Penyusunan Indikator Pembangunan Berkelanjutan



Sumber : Indikator Pembangunan Berkelanjutan, 2009

2.1.5 Indikator Lingkungan Hidup

OECD (2008), dengan mengadopsi kerangka *Pressure-State-Response* (PSR), mengembangkan tiga kategori utama indikator lingkungan hidup yaitu :

- (1) Indikator tekanan (*pressure*) terhadap lingkungan sebagai akibat dari hasil

Created with



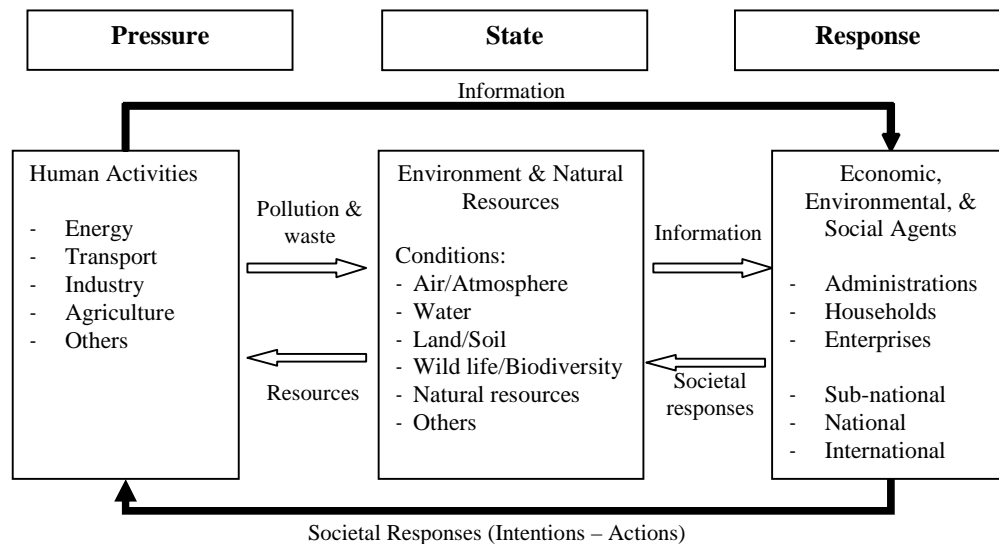
nitroPDF
download the free trial online at nitropdf.com/professional

professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

kegiatan atau aktivitas manusia, (2) indikator kondisi lingkungan (*state*) yaitu pengaruh perubahan dari aktivitas yang dilakukan pada lingkungan, (3) Indikator respon masyarakat (*response*) yaitu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dampak terhadap tekanan dan kondisi lingkungan.

Model PSR terdiri atas aktivitas manusia pada lingkungan dan pengaruh pada kualitas dan kuantitas pada kondisi lingkungan, serta respon terhadap perubahan pada lingkungan, kondisi ekonomi secara umum dan kebijakan sektor dan juga perubahan pada kebiasaan masyarakat. Model PSR menghubungkan hal-hal tersebut dan membantu pembuat kebijakan dan masyarakat untuk melihat pengelolaan lingkungan dan isu-isu lainnya yang terkait.

Gambar 2.3
Kerangka Kerja Pressure-State-Response dari OECD



Sumber : OECD, 2001 dan 2008

Berdasarkan kerangka model PSR menurut SLHD kota Semarang (2010), dalam pengelolaan lingkungan hidup alami kota semarang dirumuskan 6 indikator lingkungan hidup alami yaitu :

1. Ruang Terbuka Hijau

Meningkatnya kebutuhan lahan untuk keperluan pembangunan telah meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya lahan seperti alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan industri di Indonesia. Pengembangan sumberdaya lahan juga tidak selaras dengan berbagai kepentingan dan berbagai sektor ekonomi (Sukanto,2000). Semakin tinggi tingkat pembangunan suatu wilayah maka dapat dipastikan akan semakin tinggi pula perubahan fungsi lahan menjadai wilayah pemukiman dan industri yang terjadi, dan kerusakan lingkungan terjadi bila perubahan fungsi lahan tidak disertai dengan upaya pelestarian.

2. Hutan,

Hutan merupakan sumberdaya alam yang terbaharukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hutan merupakan aset multiguna yang tidak saja menghasilkan produk seperti kayu, arang, pulp dan lain-lain, tetapi juga memiliki nilai lain (*non-use*) seperti pelindung panas, pemecah angin, dan pelindung tanah dari bahaya erosi, serta habitat satwa dan hewan lainnya, Soemarwoto (2001).

3. Air Permukaan,

Air permukaan sangat rentan terhadap pencemaran, terutama yang berasal dari masyarakat, yaitu terutama karena kebiasaan masyarakat yang masih

suka membuang sampah dan limbah rumah tangga ke sungai. Hal tersebut menyebabkan kualitas sungai atau air permukaan menurun atau mengalami pencemaran. Jika pencemaran terjadi, maka masyarakat pula lah yang dirugikan karena tidak bisa memanfaatkan sungai atau air permukaan tersebut.

4. Air Tanah

Meningkatnya pemukiman dan jumlah penduduk membuat ketersediaan air tanah menurun, berdasarkan Status Lingkungan Hidup Kota Semarang (2010) tiap rumah setidaknya memiliki sumur yang menyedot air tanah sehingga menyebabkan penurunan permukaan tanah di Kota Semarang. Selain penurunan permukaan tanah, apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa dilakukan upaya pengelolaan yang berkelanjutan, dikhawatirkan pada tahun-tahun mendatang akan terjadi defisit sumber daya air.

5. Udara,

Menurut BLH Kota Semarang (2010), pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu kenyamanan dan estetika, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia.

6. Pesisir

Kota Semarang merupakan kota yang dekat dengan pantai. Menurut Undang-Undang tentang penataan ruang, kawasan pantai termasuk

kawasan lindung dimana sepanjang pantai 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat harus dilindungi atau batas kawasan budidaya (BLH Kota Semarang, 2010).

2.1.6 Persepsi Masyarakat

2.1.6.1. Definisi

Persepsi merupakan pengalaman mengenai objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan yang melibatkan sensasi, atensi, ekspektasi, motivasi dan memori (Irawan, 2010). Persepsi adalah proses dimana seseorang memperoleh informasi dari lingkungan sekitar. Persepsi merupakan suatu hal yang aktif. Persepsi memerlukan pertemuan nyata dengan suatu benda dan juga membutuhkan proses. Persepsi membantu individu untuk menggambarkan dan menjelaskan apa yang dilakukan oleh individu (Halim, 2005).

Menurut Mahmud (1989), persepsi adalah proses penilaian seseorang/kelompok orang terhadap objek, peristiwa, atau stimulus dengan melibatkan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan objek tersebut, melalui proses kognisi dan afeksi untuk membentuk objek tersebut. Hal tersebut adalah pengertian persepsi jika dikaitkan dengan kondisi bermasyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka persepsi publik/masyarakat dapat didefinisikan sebagai rangkaian proses kognisi atau pengenalan dan afeksi atau aktifitas evaluasi emosional (ketertarikan) masyarakat terhadap suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan cara menyimpulkan

informasi dan menafsirkan pesan tersebut dengan menggunakan media pendengaran, pengelihatatan, peraba dan sebagainya.

2.1.6.2. Proses dan Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Presepsi merupakan proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Persepsi disebut sebagai inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas (Mulyana,2001).

Adapun proses terjadinya persepsi secara umum adalah sebagai berikut (Hamka,2002) :

1. Proses Fisik. Proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia.
2. Proses Fisiologis. Proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor (alat indera) melalui saraf sensoris.
3. Proses Psikologik. Proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor.
4. Proses Persepsi. Tanggapan dan perilaku.

Arus informasi baru dari lingkungan, akan terus menerus mempengaruhi keadaan mempersepsi yang terbentuk dalam proses tersebut. Persepsi tidak hanya

berupa pengandaian saja, melainkan juga jalan menuju kebenaran yang lahir dari empirisme dan rasionalitas atau realitas (Simanuhuruk, 2003). Sejumlah factor bereran dalam membentuk dan kadang memutar balik persepsi. Faktor-faktor ini dapat berada dalam pihak pelaku persepsi, dalam objek atau target yang dipersepsikan, atau dalam konteks situasi dimana persepsi itu dibuat. Ketika individu memandang ke objek tertentu dan mencoba menafsirkan apa yang dilihat, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi individu pelaku persepsi itu. Di antara karakteristik probadi yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, kepribadian, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan harapan. Selain itu, konteks dimana kita melihat suatu objek atau peristiwa juga penting. Waktu di mana suatu objek atau peristiwa dilihat dapat mempengaruhi pemahaman, seperti juga lokasi, cahaya, panas, atau sejumlah factor-faktor situasional lainnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Kenneth F.D. Hughey, Geoffrey N. Kerr, dan Ross Cullen. (2008)

Melakukan penelitian yang berjudul “*Public Perception of New Zealand’s Environment : 2008.*” Penelitian ini berupa survey pelaporan keadaan lingkungan yang berdasarkan model analisis Pressure-State-Response (PSR). Pelaporan keadaan lingkungan Selandia Baru ini digunakan untuk menganalisis keadaan pengelolaan lingkungan di Selandia Baru dan untuk merumuskan strategi model pengelolaan lingkungan yang baik dan berkelanjutan dan sesuai dengan indikator pembangunan berkelanjutan.

Analisis statistik deskriptif dari respon digunakan untuk menentukan peranan variabel sosial-demografis. Indikator dalam penelitian ini adalah Lingkungan alam di kota, udara, daratan dan tanaman air tawar dan hewan, Hutan, tanah, pesisir dan pantai, perikanan laut, sungai, danau dan air bawah tanah, dan taman nasional. Juga topik khusus mengenai air segar, rekreasi yang berbasis sumberdaya alam dan kunjungan ke taman nasional, dan konservasi. Data Primer dengan kuesioner dengan sampel sebanyak 752 orang yang dilakukan pada tahun 2008. Responden menilai untuk pengelolaan lingkungan hidup di Selandia Baru adalah cukup atau baik.

Hasil penelitian menunjukkan keadaan lingkungan alam Selandia Baru memadai atau baik, bersih dan hijau, dan memiliki pengetahuan yang baik tentang lingkungan seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Selandia Baru. Hasil temuan dari penelitian mendorong para pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara persepsi dan fakta dapat menjadi masalah yang potensial. Oleh karena itu, persepsi publik mengenai kenyataan yang ada di lapangan yang tidak diketahui oleh pengelola dan pembuat kebijakan dibutuhkan untuk merancang kebijakan agar dapat merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan alam yang berkelanjutan.

2. Environment Research Centre (ERC), Ms. Aishath Farhath Ali (2007)

Penelitian yang dilakukan berjudul “Public Perception on *The Environment; A Maldavian Perspective*”. Environment Research Centre (REC) dari Republik Maldavia melakukan penelitian mengenai keadaan

lingkungan dan membuat data untuk kebijakan, rencana dan regulasi yang tepat berdasarkan persepsi penduduk Maldavian. Penelitian dilakukan dengan melakukan survey melalui kuesioner pada publik Maldavian. Responden dipilih secara random dengan total responden sebanyak 160.228 jiwa, dengan 60% wanita dan 40% laki-laki. Analisis data menggunakan microsoft office untuk membandingkan dan menganalisis data.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan masyarakat terhadap isu lingkungan sangatlah tinggi. Para responden menyatakan bahwa *waste management* adalah merupakan fokus mayoritas yang menjadi masalah dalam lingkungan yaitu sebesar 24%, dan kemudian *coastal erosion* yaitu sebesar 23%. Responden percaya bahwa ada dampak positif pada ekonomi dari perlindungan lingkungan, sementara akan ada dampak negatif pada lingkungan dari meningkatnya populasi. Hasil temuan mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih dan membuat kebijakan yang tepat untuk melakukan pengelolaan terhadap lingkungan pada level individu dengan pengambilan produk lingkungan yang bersahabat dan melakukan pengukuran untuk menyimpan air dan mengurangi konsumsi energi pada tingkat rumah tangga.

3. Joko Mariyono (2006)

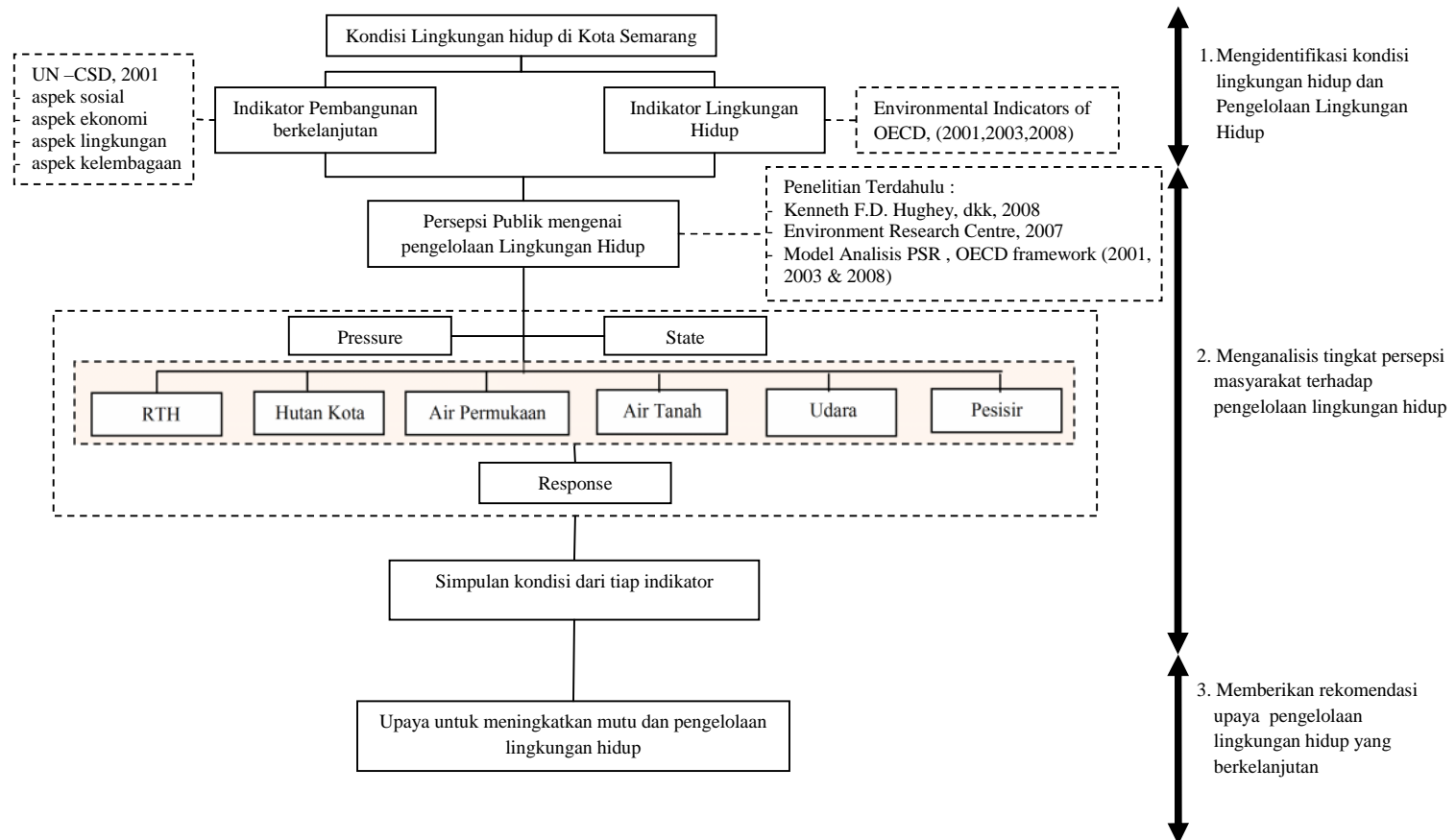
Joko Mariyono (2006), melakukan penelitian dengan judul “*Penerapan Ilmu Ekonomi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan*”. Dari penelitian tersebut ditemukan

bahwa setiap kegiatan ekonomi seharusnya melakukan perhitungan biaya lingkungan atau nilai kerugian yang diderita oleh pihak lain sebagai salah satu komponen biaya produksinya. Valuasi ekonomi lingkungan memiliki peran penting dalam menghitung nilai eksternalitas tersebut, baik untuk keperluan penentuan kebijakan pengelolaan lingkungan, akuntansi perusahaan maupun untuk pemberian kompensasi bagi individu maupun masyarakat yang terkena dampak. Instrumen ekonomi akan dapat digunakan untuk memaksa pihak yang melakukan pencemaran untuk menurunkan tingkat pencemarannya.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Persepsi masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan hidup dirasa cukup penting untuk mengetahui kondisi pengelolaan lingkungan hidup dan eksplorasi prospek keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan situasi saat ini sebagai acuan untuk memperhatikan potensi yang berkembang. Dalam hal ini *stakeholders* yang meliputi masyarakat, swasta, dan pemerintah harus diperhatikan peranannya dalam rangka meminimalkan dampak negatifnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Hasil yang dicapai diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kerangka penelitian diuraikan dalam Gambar 2.4.

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian kali ini ada beberapa variabel yang digunakan dalam Analisis persepsi masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan hidup alami yaitu melalui pendekatan *Pressure-State-Response* (PSR) berdasarkan OECD (2001,2003,2008), EPA (2006), ERC (2007), dan Kenneth F.D. Hughey, et al (2008). Adapun definisi operasional variabel yang digunakan adalah sebagai berikut

1. Definisi operasional tekanan (*pressure*) yaitu tekanan yang terjadi terhadap lingkungan sebagai akibat dari hasil kegiatan manusia dilihat dari kendaraan bermotor dan transportasi, sampah dan limbah rumah tangga, aktivitas industri, kegiatan pertanian, kegiatan kehutanan, pembangunan kota, kegiatan pariwisata, kegiatan penangkapan ikan, pembuangan limbah padat, bahan kimia berbahaya, pertumbuhan jumlah penduduk, dan pertumbuhan pemukiman penduduk.
2. Kondisi pengelolaan Lingkungan (*state*) yaitu keadaan pengelolaan lingkungan sebagai pengaruh dari kegiatan yang dilakukan pada lingkungan dilihat dari kondisi pengelolaan pada ruang terbuka hijau, hutan kota, air permukaan, air tanah, udara, dan pesisir.

3. Respon masyarakat (*response*) yaitu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dampak terhadap tekanan dan kondisi lingkungan dilihat dari peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup alami.

3.2 Penentuan Populasi dan Sampel

Metode survey menggunakan kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini data merupakan kumpulan dari sampel-sampel yang telah didapat yang kemudian dianalisis dengan cara statistik deskriptif. Pada penelitian ini survey dilakukan di Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang sebagai representatif dari pengelolaan lingkungan hidup di kota yang menjadi ibukota Provinsi Jawa Tengah. Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah seluruh penduduk kota Semarang pada tahun 2010 yaitu sebesar 1.527.433 jiwa.

Menurut Kerlinger (1998), tidak ada patokan didalam menentukan sampel representatif, tapi biasanya jumlah sampel lebih dari 30 bisa dikatakan telah dapat memberikan ragam yang stabil sebagai pendugaan ragam populasi. Oleh karena berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka diambil sampel yang dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini dilakukan *Purposive Quoted Sampling* yaitu dari sampel 110 responden masyarakat, dan ditentukan 8 responden *key persons* di Kota Semarang.

Sampel responden masyarakat sebanyak 110 orang merupakan masyarakat yang tinggal di Kota Semarang dengan anggapan bahwa apabila jika masyarakat tersebut adalah penduduk di daerah tersebut, maka masyarakat

tersebut mengetahui mengenai kondisi dan pengelolaan lingkungan di sekitarnya. Sedangkan responden *Key Persons* terdiri dari komponen A-B-G-C yaitu: Akademisi (pakar ahli dalam lingkungan, 1 orang), Pebisnis (diambil dari pelaku industri yang mengeluarkan zat polutan ke lingkungan, 2 orang), Pemerintah (Badan Lingkungan hidup Kota Semarang 2 orang, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 orang), serta Komunitas (organisasi atau yayasan yang bergerak dalam bidang lingkungan, 2 orang).

Tabel 3.1.
Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah Sampel (orang)
Responden Masyarakat	110
Responden Key Persons	
• Akademisi (A)	1
• Pebisnis (B)	2
• Pemerintah (G)	3
• Komunitas (C)	2

Sumber: Data Primer diolah, 2012

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Data Primer

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui wawancara maupun memberikan daftar pertanyaan. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui pengisian kuesioner oleh responden yaitu adalah masyarakat Kota Semarang dan responden *Key-persons*, yakni pihak-pihak yang dianggap sebagai panutan dan memegang peranan penting bersangkutan dengan pengelolaan lingkungan hidup alami di Kota Semarang. Kuesioner yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang relevan dengan tujuan

penelitian. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah mengenai persepsi masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan hidup, tekanan atau aktivitas apa yang menurut para responden yang mempengaruhi pengelolaan lingkungan, serta respon dan upaya pengelolaan yang dilakukan oleh para responden.

3.3.2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi literatur terhadap bahan-bahan pustaka dan data yang ada. Data sekunder diperoleh dengan membaca kepustakaan seperti buku-buku literatur, website internet, diktat-diktat kuliah, majalah-majalah, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pokok penelitian, surat kabar, dan mempelajari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang terdapat pada instansi terkait. Adapun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Data mengenai jumlah penduduk Kota Semarang,
2. Peta Kota Semarang
3. Data kualitas lingkungan dan kondisi pengelolaan lingkungan di Kota Semarang, diperoleh dari buku Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Semarang tahun 2010.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka.

1. Wawancara, dalam penelitian ini merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau dapat dikatakan sebagai teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan kuesioner sebanyak 118 kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis, yang bertujuan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari para responden. Sebanyak 8 kuesioner wawancara untuk *key person* dan 110 kuesioner untuk masyarakat Kota Semarang.
2. Observasi, dalam penelitian ini adalah observasi langsung dengan cara pengamatan langsung di daerah yang bersangkutan yaitu melihat kondisi lingkungan hidup di Kota Semarang dan mendokumentasikan objek penelitian dengan foto. Dengan melihat kondisi dari Ruang Terbuka Hijau, Hutan, Air Permukaan, Air Tanah, Udara, dan Pesisir dan bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh dinas terkait di Kota Semarang.
3. Dokumentasi, dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur, penerbitan, serta informasi-informasi dan data tertulis baik yang berasal dari instansi dan lembaga terkait maupun internet yang berhubungan dengan topik penelitian untuk memperoleh data sekunder. Data yang diperlukan melalui dokumentasi adalah data mengenai kualitas dan kondisi pengelolaan lingkungan hidup Kota Semarang yang diperoleh peneliti dari buku Status Lingkungan Hidup Kota Semarang dari Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan *mix method*, yakni gabungan dari dua pendekatan yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah statistik deskriptif yaitu analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat pengukuran kuantitas (jumlah dan angka). Pendekatan ini berangkat dari data yang diproses menjadi informasi bagi pengambil keputusan (Mason et al,1999). Pendekatan kualitatif dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan wawancara mendalam dengan para responden terutama responden *key persons* untuk mendapatkan keterangan yang nyata dari para responden.

3.5.1 Penentuan Indikator *Pressure–State–Response* (PSR)

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi public mengenai pengelolaan lingkungan hidup di Kota Semarang, serta memeberikan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Alasan menggunakan indikator *Pressure–State–Response* (PSR) adalah untuk mengetahui secara keseluruhan apakah yang menjadi tekanan terhadap lingkungan, mengetahui bagaimana kondisi pengelolaan yang ada, sehingga dari tekanan dan kondisi yang ada dapat dilakukan respon seperti apakah yang seharusnya dilakukan untuk pengelolaan yang berkelanjutan (OECD, 2008)

Dilakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui secara garis besar mengenai indikator yang menjadi tekanan (*Pressure*) terhadap pengelolaan lingkungan hidup, kondisi (*State*), dan respon (*Response*) upaya

pengelolaan lingkungan, kemudian dilakukan diskusi dengan panel ahli di lingkungan hidup dan mengerti mengenai kondisi pengelolaan lingkungan hidup di wilayah penelitian. Dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam dengan *key-person* diambil kesimpulan mengenai apa saja yang menjadi tekanan terhadap pengelolaan lingkungan, bagaimana kondisi pengelolaan lingkungan, serta respon upaya apa saja yang sebaiknya dilakukan. Kemudian indikator-indikator tersebut digunakan untuk penyebaran kuesioner kepada responden masyarakat.

3.5.2 Persepsi Masyarakat Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup

Untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan hidup adalah menggunakan pendekatan *Pressure-State-Response* (PSR) dengan metode analisis statistik deskriptif kualitatif yaitu dengan skala konvensional yaitu 1-10. Indikator tekanan (*pressure*) dengan indikator detailnya adalah dari aktivitas atau kegiatan manusia yang dilihat dari kendaraan bermotor dan transportasi, sampah dan limbah rumah tangga, aktivitas industri, kegiatan pertanian, kegiatan kehutanan, pembangunan kota, kegiatan pariwisata, kegiatan penangkapan ikan, pembuangan limbah padat, bahan kimia berbahaya, pertumbuhan jumlah penduduk, dan pertumbuhan pemukiman penduduk. Kondisi pengelolaan lingkungan (*state*) dilihat dari kondisi pengelolaan pada ruang terbuka hijau, hutan kota, air permukaan, air tanah, udara, dan pesisir. Indikator respon upaya masyarakat (*response*) upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dampak terhadap tekanan dan kondisi lingkungan dilihat dari peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup alami. Indikator-indikator

tersebut diperoleh melalui pengamatan dan wawancara dengan *key persons* sebelumnya. Tiap indikator pada PSR dinilai dengan skala konvensional menurut kategori, sebagai berikut :

- a. Skala 1 – 2 menunjukkan nilai rendah atau sangat buruk
- b. Skala 3 – 4 menunjukkan nilai buruk
- c. Skala 5 – 6 menunjukkan nilai biasa-biasa saja atau cukup
- d. Skala 7 – 8 menunjukkan nilai bagus
- e. Skala 9 – 10 menunjukkan nilai tinggi atau sangat bagus.